



**RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NGEBEL
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN NGEBEL
Jalan Telaga Nomer 2 Ngebel**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN NGEBEL

Jalan Raya Telaga Ngebel Nomer 2 Telp. 591045

NGEBEL

KEPUTUSAN CAMAT NGEBEL KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.4/ 12 /405.30.19/2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN NGEBEL
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021

CAMAT NGEBEL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ;
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah :
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;
19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Ngebel Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Tahun 2021.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ngebel Kabupaten.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Tahun 2020 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai Pedoman Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2021.

Pasal 5

Keputusan Camat Ngebel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ngebel
Pada Tanggal : 27 Juli 2020



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo merupakan Rencana Pembangunan dan Perencanaan Jangka Pendek 1 (satu) tahun kedepan Kecamatan Ngebel.

Dalam Rencana Kerja memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu (2019) serta kebijakan, program, kegiatan, sasaran yang disesuaikan dengan Tupoksi Kecamatan Ngebel yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngebel. Selain itu Renja sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA -PD) dan merupakan dokumen yang menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya sumber daya yang efisien, efektif dan berkelanjutan, juga digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999).

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2021 ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan perencanaan program-program yang dijalankan oleh Kecamatan Ngebel 1 (satu) tahun kedepan.

Ponorogo, 27 Juli 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
TC 29	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
TC 30	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
TC 31	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
TC 32	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	44
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	45
3.3. Program dan Kegiatan	46
TC 33	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	55
BAB V PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Ngebel Tahun 2021. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Kecamatan Ngebel dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2021.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 Kabupaten Ponorogo.

Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra dan RPJMD Tahun 2016 – 2021 sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi pokok Perangkat Daerah untuk Tahun 2020 mengalami perubahan.
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja Tahun 2021 masih berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, Permenpan 20 Tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja Perangkat Daerah, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

1. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021;
17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016);
19. Rencana Strategis Kecamatan Ngebek Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021

1.3 Maksud Dan Tujuan

- a. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngebek Tahun 2021 adalah :
 - Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Ngebek Tahun 2021.

- Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Ngebel Tahun 2021.
- b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel Tahun 2021 adalah :
- Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ngebel Tahun 2021 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2021.
 - Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan
 - Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya
- Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Ngebel dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Ngebel Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
TC.29
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
TC.30
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
TC.31

- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
TC.32

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
TC.33

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngebel tahun 2019 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas pokok Kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten :

1. Tugas :

Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan, meliputi:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan rencana anggaran Kecamatan;
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- (5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- (6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati;
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Renja Kecamatan Ngebél tahun 2019 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Ngebél, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021. Adapun Pelaksanaan sebanyak 12 (Dua Belas) Program dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kegiatan Kecamatan Ngebél antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, ATK, Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini berupa : belanja ATK, Materai, Cetak dan Penggandaan. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola dengan rencana 750 surat dan terealisasi 1.156 surat atau 154%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 15.690.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 15.690.000,- atau 100 %.

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Kegiatan ini berupa : pembayaran rekening telepon, air dan listrik. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah laporan pembayaran listrik, telpon dan air dengan rencana sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 6.600.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 6.041.574,- atau 91,54 %.

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan Kantor

Kegiatan ini berupa : belanja servise peralatan kantor selama 12 bulan. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki dengan rencana sebanyak 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp.1.099.915,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.050.000,- atau 95,46 %.

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini berupa : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja cetak dan Penggandaan, Belanja makan minum rapat, belanja jasa lainnya dan belanja honorarium non PNS. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dengan rencana sebanyak 8 orang dan terealisasi 8 orang atau 100%. Dana yang

dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 42.400.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 41.800.000,- atau 98,58 %.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini berupa : belanja peralatan kebersihan, bahan pembersih dan belanja jasa tenaga kebersihan (1 orang). Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pembayaran Jasa kebersihan kantor dengan rencana sebanyak 12 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 11.400.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 11.400.000,- atau 100 %.

f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan rumah tangga.

Kegiatan ini berupa : Belanja Modal peralatan dan mesin. Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli dengan rencana 2 Unit dan terealisasi sebanyak 2 unit atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 18.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 18.500.000,- atau 100%

g. Kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik /penerangan bangunan kantor.

Kegiatan ini berupa : belanja peralatan listrik dan penerangan kantor

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor dengan rencana sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 2.800.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.800.000,- atau 100%.

h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini berupa : Mamin pegawai dan mamin rapat.

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah penerima makan minum pegawai dan Jumlah rapat yang dilaksanakan dengan rencana sebanyak 17 orang dan terealisasi 19 orang atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 44.310.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 44.127.500,- atau 99,59,-.

- i. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah.

Kegiatan ini berupa : Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah. Indikator kegiatan ini Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti dengan rencana sebanyak 9 rapat dan terealisasi 9 rapat atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 101.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 101.000.000,- atau 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini berupa : Belanja Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan rencana sebanyak 1 unit dan terealisasi 1 unit atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 13.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 13.000.000,-, atau 100 %.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
Kegiatan ini berupa : Jasa Service, Penggantian Suku Cadang Kendaraan, BBM, belanja STNK. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan dinas yang diperbaiki/dipelihara dengan rencana sebanyak 6 unit dan terealisasi 6 unit atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 36.486.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 36.335.959,- atau 99,59%.

3. Program Peningkatan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini berupa : Belanja pakaian adat daerah. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pegawai yang menerima pakaian khusus hari-hari tertentu dengan rencana 1 orang terealisasi sebanyak 1 orang atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,-.

- b. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
Kegiatan ini berupa : Belanja pakaian dinas harian (PDH). Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pegawai yang menerima PDH dengan rencana 18 orang terealisasi 18 orang atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 7.200.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 7.200.000,-.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- a. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.
Kegiatan ini berupa : Belanja Penggandaan, Belanja makan minum rapat Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan dengan rencana sebanyak 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau 100%.
- b. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan ini berupa : Belanja Penggandaan, Belanja makan minum rapat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun dengan rencana sebanyak 5 dokumen terealisasi 5 dokumen atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau 100 %.
- c. Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD.
Kegiatan ini berupa : Belanja Penggandaan, Belanja Makan dan Minum Rapat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen perencanaan penyusunan Renstra dan Rencana Kerja dengan rencana sebanyak 8 dokumen terealisasi 8 dokumen atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau 100 %.

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Desa.

Kegiatan ini berupa : Belanja Mamin Rapat. Indikator kegiatan ini adalah jumlah produk hukum desa yang tersusun dengan rencana 40 Produk hukum terealisasi 56 Produk Hukum atau 140%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 100 %.

- b. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke Desa/Kelurahan

Kegiatan ini berupa : Belanja Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan dan Belanja ATK. Indikator kegiatan ini adalah jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan dengan rencana 8 desa terealisasi 8 desa atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 49.546.000,- atau 90,09 %.

- c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Lomba Desa

Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Belanja Penggandaan dan Belanja Makan Minum Rapat. Indikator kegiatan ini adalah jumlah desa yang mengikuti lomba desa dengan rencana 8 desa terealisasi 8 desa atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100 %.

- d. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Belanja Cetak dan Penggandaan, dan Belanja Makan Minum Rapat. Indikator kegiatan ini adalah jumlah PKK Desa yang aktif dengan rencana 8 desa terealisasi 8 desa atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100 %.

- e. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa .
Kegiatan ini berupa : Belanja Belanja Makan Minum Rapat. Indikator kegiatan ini adalah jumlah Desa yang difasilitasi kegiatan ADD dan DD dengan rencana 8 desa terealisasi 8 desa atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 100 %.
- f. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Belanja cetak dan penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, belanja Transport Lokal Non PNS. Indikator kegiatan ini adalah jumlah Desa yang mengikuti kegiatan musrenbang dengan rencana 8 desa terealisasi 8 desa atau 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 14.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 14 .000.000,- atau 100 %.
- g. Kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Kegiatan ini berupa : Belanja Honorarium PNS, Non PNS, Belanja ATK, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Pemberian Hadiah. Indikator kegiatan ini adalah Prosentase pelunasan PBB tepat waktu dengan rencana 100% terealisasi 00%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 57.309.391,- dapat terealisasi sebesar Rp. 57.309.091,- atau 100 %.
- h. Kegiatan Fasilitasi Penelitian, Penyampaian, Pengembalian, dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2
Kegiatan ini berupa : Belanja Honorarium PNS, Belanja ATK, Belanja Makan Minum Rapat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah SPPT STTS yang didistribusikan dengan rencana 16.883 obyek pajak terealisasi 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 5.200.050,- dapat terealisasi sebesar Rp. 5.200.050,- atau 100 %.

- i. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Publikasi. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah desa yang dimonitoring kegiatan kewilayahannya, Jumlah desa yang dimonitoring kegiatan FKPSBnya, Jumlah rekomendasi ijin keramaian yang diterbitkan dengan rencana 100% terealisasi 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100 %.

- j. Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Belanja pakai habis bahan makanan, Belanja pakai habis bahan peraga, Belanja Publikasi, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor/kesenian/pakaian adat, belanja makan minum rapat/tamu, belanja transport local non PNS, belanja penyelenggaraan pagelaran. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah even budaya daerah dan kesenian yang difasilitasi dengan rencana 3 even dan terealisasi 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 55.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 55.000.000,- atau 100 %.

- k. Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan peringatan kemerdekaan RI.

Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Belanja pakai habis bahan makanan, Belanja pakai habis bahan peraga, Belanja Publikasi, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan kantor/kesenian/pakaian adat, belanja makan minum rapat/tamu, belanja pakaian khusus hari-hari tertentu. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah even HUT RI yang difasilitasi dengan rencana 3 even dan terealisasi 100%. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 35.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau 100 %.

1. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat

Kegiatan ini berupa : Belanja ATK, Belanja peralatan kebersihan, Belanja pakai habis bahan peraga, Belanja bahan baku bangunan, Belanja Publikasi, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa sarana mobilitas darat, belanja makan minum rapat, belanja pakaian khusus hari-hari tertentu, belanja transport local, upah tenaga kerja konstruksi. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Pokja Desa Sehat yang difasilitasi. Dana yang dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp. 70.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 70.000.000,- atau 100 %.

Evaluasi diatas perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program dan kegiatan berdampak kepada pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana tertuang di dalam Renstra dan telah diperjanjikan di dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan terhadap indikator program maupun kegiatan tahun berjalan, tahun sebelumnya, serta proyeksi tahun yang akan datang, secara keseluruhan kami tuangkan ke dalam tabel T-C 29 berikut ini :

Tabel TC-29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan) Kabupaten Ponorogo**

KECAMATAN NGEBEL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.4. 01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	1000 Surat	-	750 Surat	1.156 Surat	-	750 Surat	1000 Surat	100
		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	17 Laporan	-	-	-	-	-	17 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	-	1.131 Surat	-	-	188	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air	Jumlah Laporan Pembayaran Telepn,Listrik dan air	36 Laporan	12 bulan	12 laporan	12 Laporan	100	12 laporan	36 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penerima Jasa Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	3 Unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Teknis Kegiatan	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan/Teknis Kegiatan	6 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	100	8 Orang	6 Orang	100
		Jumlah SPP-LS yang dibuat	100 Dokumen	-	-	-	-	-	100 Dokumen	

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Kebersihan	12 Laporan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Laporan	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor, barang cetak dan penggandaan	Jumlah ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	-	12 Bulan	-	-	100	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan Kantor	Jumlah Laporan komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli	2 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 paket	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan rumah tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	-	11 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penerima Makanan dan Minuman Harian	19 Orang	18 Orang	17 Orang	19 Orang	100	17 Orang	19 Orang	100
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	2 kali	8 Rapat	9 Rapat	9 Rapat	100	9 Rapat	2 kali	100
	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan	Jumlah Penerima Jasa Tenaga Amdinistrasi Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.4. 01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	-	1 Gedung	-	-	100	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, Rumah Jabatan dan rumah dinas	Jumlah Gedung kantor dan rumah dinas yang terpelihara	-	-	2 Gedung	2 Gedung	-	2 Gedung	-	-
	Pembangunan Gedung tempat ibadah, gedung tempat rekreasi dan olah raga	Jumlah faslitas umum yang terbangun di tempat wisata	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	100
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara / diperbaiki	4 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit	125	6 Unit	4 Unit	100
4.01.4. 01.18.05	Program Peningkatan Disiplin Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Administrasi Kepegawaian tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	Pengadaan pakaian KORPRI/Pramuka/Olah raga/seragam sekolah	Jumlah Pegawai yang menerima Pakaian Olah Raga	-	18 Orang	-	-	100	-	-	-

	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian tradisional/pakaian adat	Jumlah Pegawai yang menerima pakaian khusus hari tertentu	-	18 Orang	1 Orang	1 Orang	100	1 Orang	-	-
	Bimbingan Teknis/workshop/lokakarya implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	-	1 Orang	-	-	100	-	-	-
4.01.4.01.18.06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	20 Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	20 Dokumen	100
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan akhir tahun yang disusun	5 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	5 Dokumen	100
	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 Dokumen	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 Dokumen	100
4.01.4.01.18.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	-	100%	-	-	100%	-	-	-
	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	-	8 Desa	-	-	100	-	-	-
4.01.4.01.18.16	Program pengelolaan kekayaan budaya	Prosentase pengelolaan Pelestarian budaya daerah	-	100%	100%	-	100%	-	-	-
	Pelestarian dan pengembangan budaya daerah, pariwisata dan olah raga	jumlah even yang diikuti	-	3 even	-	-	100	-	-	-
4.01.4.01.18.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase pelunasan PBB tepat waktu	-	100%	-	-	100%	-	-	-
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan	Prosentase PBB-P2 yang diterima dan disetor tepat waktu	-	100%	-	-	100	-	-	-
	Penelitian,penyampaian,pengembangan dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2	Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusikan	-	16.767 obyek pajak	-	-	100	-	-	-

4.01.4.01.18.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	-	100%	-	-	100%	-	-	-
	Pelaksanaan evaluasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	40 Dokumen	-	-	100	-	-	-
	Fasilitasi pelaksanaan ADD dan DD	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan Dana Desa	-	8 Desa	-	-	100	-	-	-
4.01.4.01.18.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase perencanaan pembangunan daerah	-	100%	-	-	100%	-	-	-
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang	-	8 Desa	-	-	100	-	-	-
4.01.4.01.18.28	Pembinaan dan peningkatan pemerintah kabupaten/kecamatan/desa	Prosentase Desa yang dibina	-	100%	-	-	100%	-	-	-
	Peningkatan peranan wanita PKK	Jumlah pkk desa yang aktif	-	8 Desa	-	-	100	-	-	-
	Sosialisasi program kerja dan pembinaan	Jumlah Desa yang di sosialisasi dan di bina program kerjanya	-	8 Desa	-	-	100	-	-	-
4.01.4.01.18.20	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase desa yang meningkat skor IDMnya	86%	-	85%	87,5%	-	85%	85%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	40 Dokumen	-	40 Dokumen	56 dokumen	-	40 dokumen	40 Dokumen	100
	Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi penyaluran bantuan social/bencana alam	8 Desa	-	-	-	-	-	8 Desa	100
		Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	8 Desa	-	8 Desa	8 desa	-	8 desa	8 Desa	100
		Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan	17.162 Obyek Pajak	-	-	-	-	-	17.162 Obyek Pajak	100
		Prosentase Pembayaran PBB tepat waktu	100%	-	-	-	-	-	-	-

		Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan penanganan dampak covid 19	8 Desa	-	-	-	-	-	8 Desa	100
	Fasilitasi Pengembangan Desa (Lomba Desa)	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	-	-	8 Desa	8 Desa	-	8 Desa	-	100
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK Aktif	8 Desa	-	8 Desa	8 desa	-	8 desa	8 Desa	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibangun dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD	8 Desa	-	8 Desa	8 Desa	-	8 Desa	8 Desa	100
		Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan SPJ ADD dan DD	8 Desa	-	8 Desa	8 desa	-	8 desa	8 Desa	100
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Musrenbang	8 Desa	-	8 Desa	8 desa	-	8 desa	8 Desa	100
	Fasilitasi Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Prosentase PBB-P2 yang diterima dan disetor tepat waktu	-	-	100	100%	-	100%	-	-
	Fasilitasi Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2	Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusikan	-	-	16.883 Obyek Pajak	16.883 Obyek Pajak	-	16.883 Obyek Pajak	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah perguruan Bela Diri yang difasilitasi	5 Kelompok	-	5 Kelompok	5 Kelompok	-	5 Kelompok	5 Kelompok	100
		Jumlah penanganan potensi gangguan trantibum	1 Kasus	-	1 kasus	1 kasus	-	1 kasus	1 Kasus	100
		Jumlah Desa yang dimonitoring Pelaksanaan Pemilu	8 Desa	-	8 Desa	8 Desa	-	8 Desa	8 Desa	100
		Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan kewilayahan	8 Desa	-	8 Desa	8 Desa	-	8 Desa	8 Desa	100
		Jumlah Pedagang kaki Lima yang dibina	80 Orang	-	-	-	-	80 Orang	80 Orang	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah event kesenian dan kebudayaan daerah yang dilaksanakan /diikuti	4 Event	-	3 Event	3 Event	-	3 Event	4 Event	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Kemerdekaan RI	Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	1 Event	-	4 Event	4 Event	-	4 Event	1 Event	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat	Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi	8 Pokja	-	9 Pokja	9 Pokja	-	9 Pokja	8 Pokja	100

	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	Jumlah fasilitasi Keagamaan yang dilaksanakan	9 Even	-	-	-	-	-	9 Even	100
4.01.4.01.18.28	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85	-	85%	87,5%	-	85%	85	100%
	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah berkas kependudukan yang diterbitkan/dilegalisasi	1000 Dokumen	-	40 Dokumen	56 dokumen	-	40 dokumen	1000 Dokumen	100
		Jumlah SOP/SPP yang diterbitkan	38 SOP/ 1 SPP	-	-	-	-	-	38 SOP/ 1 SPP	100
		Jumlah Data Informasi Publik yang diupload	20 Data	-	-	-	-	-	20 Data	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngebel berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ngebel dapat dilihat dari indikator kinerja :

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Prosentase Desa yang meningkat skor IDNnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Ngebel memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Ngebel
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Ngebel;

13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Ngebel;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Ngebel;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah social dan Bencana Alam

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kecamatan Ngebel adapun hasilnya sebagaimana tertuang ke dalam tabel T-C 30.

Tabel TC 30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel
Kabupaten Ponorogo**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah laporan pembayaran listrik, telepon dan air yang dibayar			12 Bulan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Laporan pembayaran jasa kebersihan			12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Peralatan dan Bahan pembersih yang dibeli			-	-	4 paket	4 paket	-	-	4 paket	4 paket	
	Jumlah Laporan komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli			1 paket	2 Paket	4 Laporan	4 Laporan	1 paket	2 Paket	4 Laporan	4 Laporan	
	Jumlah Penerima Makan dan minum harian			17 Orang	19 Orang	-	-	19 Orang	19 Orang	-	-	
	Jumlah Laporan Pembayaran makan minum harian pegawai			-	-	12 Laporan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan			-	-	20 Rapat	20 Rapat	-	-	20 Rapat	20 Rapat	
	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola			-	1000 surat	1000 surat	1000 surat	-	1000 surat	1000 surat	1000 surat	
	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola, Jumlah alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan yang tersedia			750 Surat	-	-	-	1.156 Surat	-	-	-	
	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia			-	-	12 Paket	12 Paket	-	-	12 Paket	12 Paket	
	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia			-	-	4 Paket	4 Paket	-	-	4 Paket	4 Paket	
	Jumlah laporan rutin Kepegawaian			12 bulan	17 Laporan	-	-	12 Bulan	17 Laporan	-	-	

	Jumlah surat Rekomendasi /surat keterangan yang dilegalisasi/diterbitkan			-	100 Surat	-	-	-	100 Surat	-	-	
	Persentase Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP			100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki			3 unit	3 unit	6 unit	6 unit	3 unit	3 unit	6 unit	6 unit	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			2 unit	-	-	-	2 unit	-	-	-	
	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan			8 Orang	6 orang	6 orang	6 orang	8 Orang	6 orang	6 orang	6 orang	
	Jumlah SPP-LS yang dibuat			-	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	-	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	
	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti			9 Rapat	2 rapat	4 Rapat	4 Rapat	10 Rapat	2 rapat	4 Rapat	4 Rapat	
	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat			1 Orang	-	-	-	2 Orang	-	-	-	
2.	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli			-	-	2 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	
	Jumlah pengadaan meubeler gedung kantor yang dibeli			-	-	2 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	
	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara			6 Unit	4 unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	4 unit	6 Unit	6 Unit	
	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang dipelihara			2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Fasilitas umum yang terbangun di tempat wisata			-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-	-	
3.	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtiar realisasi kinerja SKPD yang disusun			8 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	8 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	
	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu			5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	

	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun			4 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	
4	Persentase Administrasi Kepegawaian tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah penerima pakaian Olah raga			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Penerima Pakaian Khusus hari-hari tertentu			1 Orang	-	20 orang	20 orang	1 Orang	-	20 orang	20 orang	
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat			-	-	1 orang	1 orang	-	-	1 orang	1 orang	
5.	Prosentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti dalam bidang Pemerintahan, Pem berdayaan Masyarakat, Keten traman dan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah desa yang mengikuti musrengbang			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Even Kebudayaan dan Olahraga yang diikuti			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Prosentase PBB-P2 yang diterima dan disetor tepat waktu			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusikan			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pokja Desa Sehat yang terbentuk			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah pkk desa yang aktif			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Desa yang disosialisasi dan dibina Program Kerjanya			-	-	-	-	-	-	-	-	

6.	Prosentase Desa yang meningkat skor IDMnya			85%	86%	87%	87%	85%	86%	87%	87%	
	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun			40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	
	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan			8 Desa	8 Desa	-	-	8 Desa	8 Desa	-	-	
	Jumlah laporan penerima jasa pembinaan anggota Forpimka			-	-	4 Laporan	4 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	
	Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam			8 Desa	8 Desa	-	-	8 Desa	8 Desa	-	-	
	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan penanganan dampak wabah (covid 19)			-	8 Desa	-	-	-	8 Desa	-	-	
	Jumlah PKK Desa Aktif			8 Desa	8 Desa	12 fasilitasi	12 fasilitasi	8 Desa	8 Desa	12 fasilitasi	12 fasilitasi	
	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Klinik Hukum			-	-	12 Laporan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan			-	-	8 Desa	8 Desa	-	-	8 Desa	8 Desa	
	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa			-	-	8 Desa	8 Desa	-	-	8 Desa	8 Desa	
	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimoni toring pelaksanaan ADD dan DD			8 Desa	8 Desa	-	-	8 Desa	8 Desa	-	-	
	Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan SPJ ADD dan DD			8 Desa	8 Desa	-	-	8 Desa	8 Desa	-	-	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Musrenbang			8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	
	Prosentase PBB-P2 yang diterima dan disetor tepat waktu			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
	Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusikan			16.883 obyek pajak	17.162 Obyek Pajak	-	-	16.883 obyek pajak	17.162 Obyek Pajak	-	-	
	Jumlah perguruan Bela Diri yang difasilitasi			5 Kelompok	5 Kelompok	-	-	5 Kelompok	5 Kelompok	-	-	

Jumlah fasilitasi kegiatan FKPSB			-	-	6 Fasilitasi	6 Fasilitasi	-	-	6 Fasilitasi	6 Fasilitasi	
Jumlah penanganan potensi gangguan trantibum			1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	
Jumlah Desa yang dimonito ring Pelaksanaan Pemilu			8 Desa	8 Desa	-	-	8 Desa	8 Desa	-	-	
Jumlah Desa yang dimonito ring Pembinaan kewilayahan			8 Desa	8 Desa	12 Laporan	12 Laporan	8 Desa	8 Desa	12 Laporan	12 Laporan	
Jumlah Pedagang Kaki Lima yang dibina ditempat wisata			-	80 Orang	12 Pembinaan	12 Pembinaan	-	80 Orang	12 Pembinaan	12 Pembinaan	
Jumlah event kesenian dan kebudaya an daerah yang dila ksanakan /diikuti			3 Event	4 Event	14 Event	14 Event	3 Event	4 Event	14 Event	14 Event	
Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI			4 Event	1 Event	2 Event	2 Event	4 Event	1 Event	2 Event	2 Event	
Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi			9 Pokja	8 Pokja	8 Pokja	8 Pokja	9 Pokja	8 Pokja	8 Pokja	8 Pokja	
Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa tingkat kecamatan			8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	
jumlah desa yang mengikuti BBGRM			-	-	8 Desa	8 Desa	-	-	8 Desa	8 Desa	
Jumlah event olahraga yang diikuti			-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan			-	9 Event	2 Event	2 Event	-	9 Event	2 Event	2 Event	
Jumlah Fasilitasi kegiatan Kabupaten Layak Anak			-	-	2 Fasilitasi	2 Fasilitas	-	-	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	
Nilai SKM Pelayanan Administrasi			85	85	86	86	85	85	86	86	
Jumlah SOP yang di terbitkan			38 Dok	38 Dok	38 Dok	38 Dok	38 Dok	38 Dok	38 Dok	38 Dok	
Jumlah SPP yang di terbitkan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
Jumlah surat keterangan/ rekomendasi yang diterbitkan			-	100 dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	-	100 dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	
Jumlah Berkas Kependudu kan yang diterbitkan /dilegalisasi			-	1.000 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	-	1.000 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	
Jumlah data Infor masi Publik yang di Upload			-	20 Data	12 Data	12 Data	-	20 Data	12 Data	12 Data	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Ngebel sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Ngebel masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- (1) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
- (2) Sistem kerja yang belum optimal;
- (3) Keterbatasan SDM yang berkualitas

Visi Kabupaten Ponorogo adalah “ **PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS** “. Untuk mendukung visi tersebut, perlu disusun misi sebagai upaya tahap berikutnya.

Adapun Misi Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat.
2. Mengelola seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.
3. Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan umum.

4. Membangun sistem pertanian modern, sebagai basis pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industri, serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.
5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan, sekaligus upaya mempercepat pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan.
6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran, serta perluasan kesempatan kerja.
7. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan bertaqwa.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngebél, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Ponorogo kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Ponorogo;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh

memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, Adil, ramah dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayananprima kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan Kecamatan Ngebel adalah mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahtreaan Masyarakat , Asset pertanahan dan keamanan wilayah .

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat

Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Review tersebut digambarkan pada tabel T-C. 31 berikut :

Tabel TC 31

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Ponorogo**

KECAMATAN NGBEL

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Ngebel	Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	100%	243.300.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Ngebel	Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	100%	166.239.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Ngebel	Jumlah laporan pembayaran listrik, telepon/internet dan air yang dibayarkan	12 Laporan	10.500.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Ngebel	Jumlah laporan pembayaran listrik, telepon/internet dan air yang dibayarkan	12 Laporan	13.248.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Ngebel	Jumlah Laporan pembayaran jasa kebersihan Jumlah Peralatan kebersihan yang dibeli	12 Laporan 4 Paket	15.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Ngebel	Jumlah Laporan pembayaran jasa kebersihan Jumlah Peralatan kebersihan yang dibeli	12 Laporan 4 Paket	12.591.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kec. Ngebel	Jumlah Laporan komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli	4 Laporan	2.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kec. Ngebel	Jumlah Laporan komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli	4 Laporan	2.000.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Ngebel	Jumlah laporan penerima makanan dan minuman Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	12 laporan 20 rapat	70.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kec Ngebel	Jumlah laporan penerima makanan dan minuman Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	12 laporan 20 rapat	64.000.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec.Ngebel	Jumlah surat Keluar masuk yang dikelola	1000 surat	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec Ngebel	Jumlah Surat Keluar masuk yang dikelola	1000 surat	4.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Ngebel	Jumlah ATK yang tersedia	12 laporan	20.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kec Ngebel	Jumlah ATK yang tersedia	12 laporan	20.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Ngebel	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	4 paket	2.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Ngebel	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	4 paket	3.022.000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Kec. Ngebel	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	6 item	2.500.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Kec.Ngebel	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	6 Item	1.000.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	Kec. Ngebel	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan Jumlah SPP-LS yang dibuat	6 orang 100 Dokumen	40.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	Kec. Ngebel	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan Jumlah SPP-LS yang dibuat	6 orang 100 Dokumen	31.500.000	

	Rapat rapat koordinasi dalam daerah dan rapat rapat koordinasi dan	Kec. Ngebel	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	10 rapat	77.500.000	Rapat rapat koordinasi dalam daerah dan rapat rapat koordinasi dan	Kec. Ngebel	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	4 rapat	14.878.000	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Ngebel	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	298.500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Ngebel	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	116.909.714	
	Penyediaan peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas	Kec. Ngebel	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	3 Unit	32.000.000	Penyediaan peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas	Kec. Ngebel	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	2 Unit	21.000.000	
	Pengadaan Mebelair gedung kantor dan sarana prasarana kerja kantor	Kec Ngebel	Jumlah Mebelair yang dibeli	4 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebelair gedung kantor dan sarana prasarana kerja kantor	Kec Ngebel	Jumlah Mebelair yang dibeli	2 Unit	19.222.300	
	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil dinas jabatan kendaraan dinas/ operasional	Kec. Ngebel	Jumlah kendraan dinas/operasional yang dipelihara	6 unit	56.500.000	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil dinas jabatan kendaraan dinas/ operasional	Kec. Ngebel	Jumlah kendraan dinas/operasional yang dipelihara	6 unit	56.687.414	
	Pemeliharaan rutin/ber kala gedung kantor,sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	Kec. Ngebel	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang dipelihara	2 Gedung	190.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang edung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas	Kec. Ngebel	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	20.000.000	
3.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Ngebel	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	6.000.000	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Ngebel	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	4.000.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ngebel	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	20 dokumen	2.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Ngebel	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	20 dokumen	1.500.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kec. Ngebel	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	5 dokumen	2.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kec. Ngebel	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	5 dokumen	1.000.000	
	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Kec. Ngebel	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	8 dokumen	2.000.000	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Kec. Ngebel	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	8 dokumen	1.500.000	
4.	Program Peningkatan disiplin aparatur Dan Pengembangan Sum berdaya Aparatur	Kec. Ngebel	Persentase Administrasi Kepegawaian tepat waktu	100%	12.000.000	Program Peningkatan disiplin aparatur Dan Pengembangan Sum berdaya Aparatur	Kec. Ngebel	Persentase Administrasi Kepegawaian tepat waktu	100%	13.500.000	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Ngebel	Jumlah Penerima Pakaian Khusus hari-hari tertentu	20 orang	6.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kec. Ngebel	Jumlah Penerima Pakaian Khusus hari-hari tertentu	20 orang	7.000.000	

	Pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Ngebel	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	1 Orang	5.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Ngebel	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	1 Orang	5.000.000	
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Kec. Ngebel	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	17 Orang	1.000.000	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Kec. Ngebel	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	17 Orang	1.500.000	
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Ngebel	Prosentase Desa yang meningkat skor IDMnya	86%	342.200.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Ngebel	Prosentase Desa yang meningkat skor IDMnya	86%	162.924.300	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Ngebel	Jumlah Produk hukum Desa yang tersusun	40 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Ngebel	Jumlah Produk hukum Desa yang tersusun	40 Dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke Desa/Kelurahan	Kec. Ngebel	Jumlah laporan penerima jasa pembinaan anggota Forpimka	2 Orang	9.200.000	Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke Desa/Kelurahan	Kec. Ngebel	Jumlah laporan penerima jasa pembinaan anggota Forpimka	2 Orang	9.200.000	
			Jumlah Laporan Pembayaran jasa klinik hukum	12 Laporan				Jumlah Laporan Pembayaran jasa klinik hukum	12 Laporan	12.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kec. Ngebel	Jumlah PKK Desa yang Aktif	8 Desa	15.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kec. Ngebel	Jumlah PKK Desa yang Aktif	8 Desa	10.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa	Kec. Ngebel	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	8 Desa	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa	Kec. Ngebel	Jumlah Desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	8 Desa	6.000.000	
			Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan Keuangan & Pendaayagunaan asset Desa	8 Desa				Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan Keuangan dan Pendaayagunaan asset Desa	8 Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kec. Ngebel	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Musrenbang	8 Desa	14.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kec. Ngebel	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Musrenbang	8 Desa	5.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ngebel	Jumlah fasilitasi FKPSB dan penanganan gangguan trantibum	6 Fasilitasi	5.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ngebel	Jumlah perguruan Bela Diri yang difasilitasi	5 Kelompok	5.000.000	
			Jumlah Penyuluhan Pedagang Kaki Lima	12 laporan				Jumlah penanganan potensi gangguan trantibum	1 kasus		
			Jumlah monitoring keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan	12 laporan				Jumlah Desa yang dimonitoring Pelaksanaan Pemilu	8 Desa		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Kec. Ngebel	Jumlah event kesenian dan kebudayaan daerah yang dilaksanakan /diikuti	14 Event	80.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Kec. Ngebel	Jumlah event kesenian dan kebudayaan daerah yang dilaksanakan /diikuti	14 Event	34.506.400	

	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Kemerdekaan RI	Kec. Ngebel	Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	3 Event	30.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Kemerdekaan RI	Kec. Ngebel	Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	2 Event	20.717.900	
	Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat	Kec. Ngebel	Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi	8 Pokja	47.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat	Kec. Ngebel	Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi	8 Pokja	13.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Desa (Lomba Desa)	Kec. Ngebel	Jumlah Desa yang mengikuti lomba de sa tingkat kecamatan	8 Desa	5.000.000	Fasilitasi Pengembangan Desa (Lomba Desa)	Kec. Ngebel	Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa tingkat kecamatan	8 Desa	5.000.000	
	Fasilitasi BBGRM	Kec. Ngebel	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan BBGRM	8 Desa	5.000.000	Fasilitasi BBGRM	Kec. Ngebel	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan BBGRM	8 Desa	2.500.000	
	Fasilitasi kerukunan umat beragama	Kec. Ngebel	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan	2 Even	123.000.000	Fasilitasi kerukunan umat beragama	Kec. Ngebel	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan	2 Even	35.000.000	
	Fasilitasi Kabupaten Kota Layak Anak	Kec. Ngebel	Jumlah Fasilitasi kegiatan Kabupaten Layak Anak	2 Fasilitas	5.000.000	Fasilitasi Kabupaten Kota Layak anak	Kec. Ngebel	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kabupaten Layak anak	2 Fasilitas	2.000.000	
6.	Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Kec. Ngebel	Nilai SKM Pelayanan Administrasi	86	10.000.000	Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Kec. Ngebel	Nilai SKM Pelayanan Administrasi	86	4.000.000	
	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kec. Ngebel	Jumlah SOP yang di terbitkan	38 Dok	10.000.000	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kec. Ngebel	Jumlah SOP yang di terbitkan	38 Dok	1.500.000	
Jumlah SPP yang di terbitkan			1 Dok	Jumlah SPP yang di terbitkan				1 Dok			
Jumlah Berkas Kepen dudukan, surat keterangan /rekomendasi yang diterbitkan			1.500 Dokumen	Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan		Kec. Ngebel	Jumlah Berkas Kepen dudukan, surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan	1.000 Dokumen	1.500.000		
Jumlah Data Informasi Pelayanan/Kegiatan yang diupload			30 Data	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Kec. Ngebel	Jumlah Data Informasi Pelayanan/Kegiatan yang diupload	12 Data	1.000.000		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan yang dibahas didalam Musrengbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat dukuh dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawah ke forum Musrengbangdes. Di forum Musrengbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrengbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrengbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Hal tersebut bisa dilihat pada table TC.32 :

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN NGEBEL

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI			INDIKATOR KINERJA	Volume	Satuan	CATATAN
				RT/RW/DESA				
1	Pembangunan Drainase	2	2	Gondowido	Jumlah panjang drainase yang dibangun	500	meter	PUPR
2	Pembangunan Talud	1	3	Gondowido	Jumlah panjang talud yang dibangun	100	meter	PUPR
3	Rehab Aspal	1	3	Gondowido	Jumlah panjang jalan yang direhap	1000	meter	PUPR
4	Pembangunan Rabat Beton	2	3	Gondowido	Jumlah Panjang Jalan yang dirabat	500	meter	PUPR
5	Rehab Aspal	2	2	Gondowido	Jumlah panjang jalan yang direhap	1000	meter	PUPR
6	Pengaspalan Jalan	2	1	Gondowido	Jumlah panjang jalan yang di aspal	1000	meter	PUPR
7	Pengaspalan Jalan	2	2	Gondowido	Jumlah panjang jalan yang di aspal	1000	meter	PUPR
8	Pengadaan Tempat Sampah	0	0	Gondowido	Jumlah Peralatan yang dibeli	1	unit	Dinas LH
9	Rehab Jaringan Air Minum	2	1	Ngebel	Jumlah panjang jaringan air minum	1500	meter	PUPR
10	Pengadaan Dam Pengendali / Bronjong	1	1	Ngebel	Jumlah Bronjong yang dibeli	2	unit	PUPR
11	Pembangunan Drainase / Saluran	2	1	Ngebel	Jumlah panjang drainase yang dibangun	200	meter	PUPR
12	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	2	1	Ngebel	Jumlah TPS yang dibangun	1	unit	Dinas LH
13	Talud Badan Jalan	1	1	Ngebel	Jumlah Panjang Talud badan jalan yang dibangun	225	meter	PUPR
14	Pengadaan Dam Pengendali / Bronjong	1	1	Ngebel	Jumlah Dam Pengendali yang dibeli	2	unit	PUPR
15	Pembangunan Drainase / Saluran	2	1	Ngebel	Jumlah panjang drainase yang dibangun	500	meter	PUPR
16	Pengadaan Lampu Jalan	0	0	Ngebel	Jumlah Lampu Jalan yang dibeli	100	unit	Dinas Perhubungan
17	Pengadaan Tempat Sampah	1	1	Ngebel	Jumlah Tempat Sampah yang dibeli	50	unit	Dinas LH
18	Pengadaan alat pengolahan Duren dan Pelatihan	0	0	Ngebel	Jumlah panjang dan Pelatihan yang dibangun	1	unit	Perdakum

19	Pembangunan Rabat Jalan	1	1	Ngrogung	Jumlah panjang Rabat Jalan yang dibangun	200	meter	PUPR
20	Pembangunan Rabat Jalan	2	1	Ngrogung	Jumlah panjang Rabat Jalan yang dibangun	10000	meter	PUPR
21	Pembangunan Rabat Jalan	2	1	Ngrogung	Jumlah panjang Rabat Jalan yang dibangun	750	meter	PUPR
22	Pembangunan Talud	2	1	Ngrogung	Jumlah panjang Talud yang dibangun	50	meter	PUPR
23	Pembangunan Talud	2	1	Ngrogung	Jumlah panjang Talud yang dibangun	75	meter	PUPR
24	Pengembangan Wisata Agro	0	0	Ngrogung	Jumlah panjang Wisata Agro yang dibangun	1	unit	Dinas Pariwisata
25	Pembangunan Drainase / Saluran	2	1	Pupus	Jumlah panjang Drainase yang dibangun	300	meter	PUPR
26	Pembangunan Drainase / Saluran	2	1	Pupus	Jumlah panjang Drainase yang dibangun	1000	meter	PUPR
27	Pengaspalan Jalan	3	2	Pupus	Jumlah panjang Jalan yang diaspal	500	meter	PUPR
28	Pengaspalan Jalan	1	1	Pupus	Jumlah panjang Jalan yang diaspal	500	meter	PUPR
29	Pembangunan Talud	3	2	Pupus	Jumlah panjang talud yang dibangun	500	meter	PUPR
30	Pembangunan Talud	2	1	Pupus	Jumlah Panjang Talud yang dibangun	500	meter	PUPR
31	Pembangunan Talud	2	1	Pupus	Jumlah Panjang Talud yang dibangun	500	meter	PUPR
32	Pengaspalan Jalan/Hotmix	0	0	Pupus	Jumlah panjang jalan yang diaspal	6000	meter	PUPR
33	Pengadaan Bibit Buah Kebun Desa/ wisata Agro	0	0	Pupus	Jumlah bibit buah yang dibeli	1500	batang	Dinas Pertanian
34	Pembangunan saluran	1	1	Sahang	Jumlah Panjang saluran yang dibangun	20	meter	PUPR
35	Peningkatan Jalan	1	1	Sahang	Jumlah Panjang jalan yang dibangun	1911	meter	PUPR
36	Pengadaan Jalan Intensifikasi Usaha Tani	1	1	Sahang	Jumlah panjang Jalan yang dibangun	2000	meter	PUPR
37	Talud Jalan Bandongan	2	1	Sahang	Jumlah panjang talud yang dibangun	12	meter	PUPR
38	Pembangunan Jaringan Saluran Air Minum	0	0	Sahang	Jumlah panjang jaringan air minum yang dibangun	7550	meter	PUPR
39	Peningkatan Jalan Poros Desa	1	1	Sahang	Jumlah Panjang jalan poros desa yang dibangun	600	meter	PUPR
40	Talud Penahan tebing	1	2	Sahang	Jumlah panjang talud yang dibangun	400	meter	PUPR

41	Pengadaan Bibit Durian dan Cengkeh	0	0	Sahang	Jumlah Bibit durian dan Cengkeh yang dibeli	10000	batang	Dinas Pertanian
42	Peningkatan Jalan Poros Desa Rijit	3	1	Sahang	Jumlah Panjang jalan poros desa yang dibangun	500	meter	PUPR
43	Pembangunan Rabat Jalan	2	2	Sempu	Jumlah panjang Rabat Jalan yang dibangun	600	meter	PUPR
44	Pembangunan Talud Jalan	2	2	Sempu	Jumlah panjang Talud Jalan yang dibangun	150	meter	PUPR
45	Pembangunan Talud Jalan	2	1	Sempu	Jumlah panjang Talud Jalan yang dibangun	200	meter	PUPR
46	Pembangunan Saluran	1	2	Sempu	Jumlah Panjang saluran yang dibangun	200	meter	PUPR
47	Pengadaan Bibit Tanaman Buah	0	0	Sempu	Jumlah bibit buah yang dibeli	1000	batang	Dinas Pertanian
48	pengadaan alat pengolah kripik dan pelatihan	0	0	Sempu	Jumlah alat pengolahan yang dibeli	1	unit	Perdakum
49	Pengaspalan Jalan	1	1	Talun	Jumlah panjang jalan yang diaspal	2000	meter	PUPR
50	Pembangunan Rabat Beton Watumaling	1	2	Talun	Jumlah panjang rabat jalan yang dibangun	500	meter	PUPR
51	Pembangunan Rabat Beton Tritis	1	2	Talun	Jumlah panjang Rabat Jalan yang dibangun	500	meter	PUPR
52	Pembangunan Talud Jalan	1	2	Talun	Jumlah panjang Talud Jalan yang dibangun	83	meter	PUPR
53	Pengadaan alat pengolahan produk unggulan	0	0	Talun	Jumlah alat pengolahan yang dibeli	2	unit	Perdakum
54	Pembangunan Talud penahan jalan masuk SMP 1 Atap	0	0	Talun	Jumlah panjang talud yang dibangun	30	meter	PUPR
55	Pembangunan Drainase / Saluran	0	0	Talun	Jumlah Panjang Drainase yang dibangun	1000	meter	PUPR
56	Pembangunan Drainase / Saluran	1	2	Wagir Lor	Jumlah panjang drainase yang dibangun	2000	meter	PUPR
57	Pembangunan Drainase / Saluran	2	1	Wagir Lor	Jumlah panjang drainase yang dibangun	500	meter	PUPR
58	Pembangunan Drainase / Saluran	1	3	Wagir Lor	Jumlah panjang drainase yang dibangun	600	meter	PUPR

59	Pembangunan Talud Jalan	1	3	Wagir Lor	Jumlah panjang Talud Jalan yang dibangun	200	meter	PUPR
60	Pembangunan Talud Jalan	1	3	Wagir Lor	Jumlah panjang Talud Jalan yang dibangun	150	meter	PUPR
61	Pembangunan Pasar Wisata	0	0	Wagir Lor	Jumlah unit pasar wisata yang dibangun	3	unit	Dinas Pariwisata
62	Pelatihan Kelompok Wanita Tani (aneka kripik)	0	0	Wagir Lor	Jumlah kelompok pelatihan	5	kelompok	Perdakum
63	MCK Umum / wisata	0	0	Wagir Lor	Jumlah MCK yang dibangun	20	unit	PUPR
64	Pembangunan Talud Jalan	2	1	Wagir Lor	Jumlah panjang talud yang dibangun	200	meter	PUPR
65	Pengadaan alat pembuatan kue	0	0	Wagir Lor	Jumlah alat pembuat kue	5	unit	Perdakum

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan memper timbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Ngebel dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien .
2. Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum
4. Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan disegala bidang, dan
5. Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Ngebel dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo adalah Letak geografis wilayah Kecamatan Ngebel berada dalam ketinggian 734 meter

dipermukaan laut sangat baik dari sisi Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan. Kecamatan Ngebel juga mempunyai Cagar Budaya di Wilayah Desa Pupus berupa Air Terjun Toyomarto, Pemandian Air Panas di Desa Wagir Lor serta sebuah Telaga Ngebel yang sangat mempesona. Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Ngebel. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Ngebel serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ngebel yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Ngebel Tahun 2016-2021.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Ngebel mempunyai *tujuan* : **“Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”**.

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun Sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi .

Dengan indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Dengan indikator : Prosentase Desa yang meningkat skor IDMnya

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan menjadi 6 (Enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan Kecamatan Ngebel adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Kecamatan Ngebel sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan ;
- 1) Pengadaan mebel;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan dinas Jabatan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1)Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan;
 - 2)Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;
 - 3)Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
- c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1)Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan pihak swasta;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinsi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional ;
 - 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan;

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa;
 - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - 3) Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - 4) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 6) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif
 - 7) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel perumusan program dan kegiatan tersaji dalam lampiran tabel T-C. 33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Ponorogo**

KECAMATAN NGEBEL

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2021				Cata tan Pen ting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Taget Capaian Kinerja	Sumber Dana		Taget Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kec Ngebel		1,825,111,134	APBD			1.953.601.650,94
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		100%	3,000,000			100%	4,000,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		8 Dokumen	1,500,000			8 Dokumen	2,000,000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		20 Dokumen	1,500,000			6 Dokumen	2,000,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan PD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun		100%	1,503,376,000			100%	1,547,788,096
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan		16 orang	1,467,576,000			17 orang	1.510.788.095,94
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima jasa administrasi Keuangan dan teknis Kegiatan		5 Orang	34,800,000			5 Orang	36,000,000
		Jumlah SPP yang dibuat		100 Dokumen				100 Dok	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun		5 Dokumen	1,000,000			5 Dokumen	1,000,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian PD	Persentase Keakuratan Data Kepegawaian		100%	13,500,000			100%	13,500,000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah Penerima Pakaian Dinas		17 Orang	7,000,000			19 Orang	7,000,000
7.01.01.2.05.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan/pembinaan administrasi kepegawaian		-	-			12 Laporan	1.500.000

7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat		1 Orang	5,000,000			1 Orang	5,000,000
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		17 Orang	1,500,000			-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	121,600,000			100%	187.313.555
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli		4 laporan	2,000,000			4 laporan	2,000,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibeli		2 unit	21,000,000			3 item	40,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang dibeli		-	-			2 item	38,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		12 paket	80,700,000			6 paket	80,313,555
		Jumlah Laporan Penerimaan makan minum harian		12 laporan				12 laporan	
		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		20 rapat				20 rapat	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia		4 paket	3,022,000			4 paket	4,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi kunjungan tamu		-	-			5 fasilitasi	5,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti		5 rapat	14,878,000			3 rapat	15,000,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah fasilitasi Inovasi berbasis digital yang diikuti/dilaksanakan		-	-			1 fasilitasi	3,000,000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang tersedia		100%	19,222,300			100%	25,000,000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair yang dibeli		2 unit	19,222,300			2 item	25,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	17,248,000			100%	17,248,000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola		1000 Surat	4,000,000			1200 Surat	5,000,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan pembayaran listrik,telepon/internet dan air yang dibayarkan		12 laporan	13,248,000			12 laporan	12,500,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara		100%	147,164,834			100%	147,164,834
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		6 unit	56,687,414			2 unit	57,000,000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki		6 item	1,000,000			3 unit	1,000,000

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Knator yang dipelihara		1 Unit	89,477,420			1 Unit	100.000.000,-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	Kec Ngebel	86%	132,337,880			86%	110.337.880,-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjuti		100%	115,746,880			100%	110.337.880,-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Perayaan HUT RI, Grebeg Suro, Kec Sehat)	Jumlah event kesenian/kebudayaan daerah yang dilaksanakan/diikuti		4 Event	115,746,880			4 Event	110.337.880,-
		Jumlah event yang diadakan dalam rangka HUT RI		3 Event				4 Event	
		Jumlah Fasilitas pembinaan bidang Pendidikan/kepemudaan/olah raga dan perlindungan anak		-				4 Fasilitas	
		Jumlah fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial, Dampak Wabah penyakit dan Bencana Alam.		12 Laporan				12 Laporan	
		Jumlah pembinaan kesehatan/Gizi/ Pemerantasan penyakit menular		8 Pokja				8 Pokja	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Publik yang disusun		100%	4,000,000			100%	7,000,000
7.01.02.2.02.01	Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah SOP yang diterbitkan		38 Dokumen	1,500,000			38 Dokumen	2,000,000
		Jumlah SPP yang diterbitkan		1 Dokumen				1 Dokumen	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah berkas kependudukan,surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan		1000 Dokumen	1,500,000			1000 Dokumen	3,000,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Data Informasi Pelayanan/kegiatan yang diupload		12 data	1,000,000			12 data	2,000,000
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terpelihara		100%	12,591,000			100%	15,000,000
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Laporan pembayaran jasa kebersihan		12 Laporan	12,591,000			12 Laporan	15,000,000
		Jumlah Peralatan kebersihan yang dibeli	Kec Ngebel	4 paket				4 paket	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				7,500,000				7.500.000,-

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desanya		75%	7,500,000			75%	3,500,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kegiatan BBGRM dan Lomba Desa)	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan BBGRM		8 desa	7,500,000			8 desa	3,500,000
		Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa		8 desa			8 desa		
		Jumlah UMKM/Bumdes yang dibina dan difasilitasi		8 desa			8 desa		
		Jumlah desa yang dibina kegiatan penghijauan /lingkungan hidup		-			8 desa		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatannya		-				75%	4.000.000,-
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UMKM/Bumdes yang dibina dan difasilitasi kegiatan ekonominya		-				8 Kelompok	2.000.000,-
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang dibina produksi / distribusi hasil produksinya		-				8 Desa	2.000.000,-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec Ngebel		2,000,000			75%	2,000,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan lintas sektor yang terlaksana		75%	2,000,000			75%	2,000,000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Fasilitasi lintas sektor dan FKPSB		6 Fasilitasi	2,000,000			6 Fasilitasi	2,000,000
		Jumlah Laporan penanganan gangguan trantibum		1 Kasus				1 Kasus	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec Ngebel		44,200,000				44,200,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan program kerja ke pemerintah Desa yang terlaksana		75%	44,200,000			75%	44,200,000
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan		2 Event	35,000,000			1 Event	15,000,000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan jasa pembinaan anggota Forpimka		4 laporan	9,200,000			-	29.200.000
		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan ke Pemerintah Desa		6 Fasilitasi				8 Fasilitasi	-

		Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan DD		8 Desa	-			-	-
		Jumlah Fasilitas pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum		-	-			3 Fasilitas	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec Ngebel		39,000,000				39,000,000
7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti		100%	39,000,000			100%	39,000,000
7.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun		40 Dokumen	3,000,000			40 Dokumen	3,000,000
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina administrasi tata pemerintahannya		8 desa	3,000,000			8 desa	3,000,000
		Jumlah Laporan Kependudukan yang disusun		12 Laporan				12 Laporan	
7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangan dan aset desanya		8 desa	3,000,000			8 desa	3,000,000
		Jumlah desa yang dibina, difasilitasi dan dimonitoring pelaksanaan ADD/DD		-				-	
		Jumlah SPPT/STTS PBB yang didistribusikan tepat waktu		18.150				18.153	
		Prosentase pembayaran PBB tepat waktu		100%				100%	
7.01.06.2.01.04	Fasilitas penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pembayaran jasa klinik hukum		12 laporan	12,000,000			12 laporan	12,000,000
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah monitoring keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan		12 laporan	3,000,000			12 laporan	3,000,000
		Jumlah Pedagang Kaki Lima yang dibina ditempat wisata		70 Orang				70 Orang	
7.01.06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang		8 desa	5,000,000			8 desa	5,000,000
		Jumlah desa yang Menyusun profil desa							
7.01.06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK)	Jumlah PKK Desa yang dibina		8 desa	10,000,000			8 desa	10,000,000
JUMLAH					2,050,149,014				2.178.639.530,94

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, maka disusunlah rencana kerja serta usulan pendanaan sebagaimana terlampir :

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kec Ngebel		1,825,111,134	APBD
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		100%	3,000,000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		8 Dokumen	1,500,000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		20 Dokumen	1,500,000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan PD	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun		100%	1,503,376,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan		16 orang	1,467,576,000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima jasa administrasi Keuangan dan teknis Kegiatan		5 Orang	34,800,000	
		Jumlah SPP yang dibuat		100 Dokumen		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun		5 Dokumen	1,000,000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian PD	Persentase Keakuratan Data Kepegawaian		100%	13,500,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah Penerima Pakaian Dinas		17 Orang	7,000,000	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat		1 Orang	5,000,000	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		17 Orang	1,500,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	121,600,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang dibeli		4 laporan	2,000,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibeli		2 unit	21,000,000	
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		12 paket	80,700,000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penerimaan makan minum harian		12 laporan		
		Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		20 rapat		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia		4 paket	3,022,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti		5 rapat	14,878,000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang tersedia		100%	19,222,300	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair yang dibeli		2 unit	19,222,300	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	17,248,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola		1000 Surat	4,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan pembayaran listrik, telepon/internet dan air yang dibayarkan		12 laporan	13,248,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara		100%	147,164,834	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		6 unit	56,687,414	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki		6 item	1,000,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Knator yang dipelihara		1 Unit	89,477,420	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	Kec Ngebel	86%	132,337,880	

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan yang di tindak lanjuti		100%	115,746,880	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Perayaan HUT RI, Grebeg Suro, Kec Sehat)	Jumlah event kesenian/kebudayaan daerah yang dilaksanakan/diikuti		4 Event	115,746,880	
		Jumlah event yang diadakan dalam rangka HUT RI		3 Event		
		Jumlah Desa yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial, Dampak Wabah penyakit dan Bencana Alam.		8 Desa		
		Jumlah Pokja Sehat yang difasilitasi		8 Pokja		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Publik yang disusun			4,000,000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah SOP yang diterbitkan		38 Dokumen	1,500,000	
		Jumlah SPP yang diterbitkan		1 Dokumen		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah berkas kependudukan,surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan		1000 Dokumen	1,500,000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Data Informasi Pelayanan/kegiatan yang diupload		12 data	1,000,000	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang terpelihara			12,591,000	
7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Laporan pembayaran jasa kebersihan		12 Laporan	12,591,000	
		Jumlah Peralatan kebersihan yang dibeli	Kec Ngebel	4 paket		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				7,500,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Desa yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desanya		75%	7,500,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kegiatan BBGRM dan Lomba Desa)	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan BBGRM		8 desa	7,500,000	
		Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa		8 desa		
		Jumlah UMKM/Bumdes yang dibina dan difasilitasi		8 desa		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec Ngebel		2,000,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan lintas sektor yang terlaksana		75%	2,000,000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Fasilitasi lintas sektor dan FKPSB		6 Fasilitasi	2,000,000	
		Jumlah Laporan penanganan gangguan trantibum		1 Kasus		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Kec Ngebel		44,200,000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan pembinaan program kerja ke pemerintah Desa yang terlaksana		75%	44,200,000	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Fasilitasi kegiatan keagamaan		2 Event	35,000,000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan jasa pembinaan anggota Forpimka		4 laporan	9,200,000	
		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan ke Pemerintah Desa		6 Fasilitasi		
		Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan DD		8 Desa		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec Ngebel		39,000,000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti		100%	39,000,000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang disusun		40 Dokumen	3,000,000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina administrasi tata pemerintahannya		8 desa	3,000,000	
		Jumlah Laporan Kependudukan yang disusun		12 Laporan		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangan dan aset desanya		8 desa	3,000,000	
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pembayaran jasa klinik hukum		12 laporan	12,000,000	

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah monitoring keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan		12 laporan	3,000,000	
		Jumlah Pedagang Kaki Lima yang dibina ditempat wisata		70 Orang		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang		8 desa	5,000,000	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK)	Jumlah PKK Desa yang dibina		8 desa	10,000,000	
JUMLAH					2,050,149,014	

BAB VI P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, kedisiplinan dan transparansi dari pelaku pembangunan sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngebel Tahun 2021, Camat Ngebel melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Rencana Kerja Kecamatan Ngebel tahun 2020 dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Ngebel setiap kegiatan. Perlu disadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahan. Untuk itu diperlukan kerja keras dari seluruh komponen aparatur agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat digunakan sebagai landasan berpijak dalam penyusunan anggaran dan melaksanakan kebijakan program pembangunan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“Ponorogo lebih maju, berbudaya dan religius”**.

Amien.

Ponorogo, 27 Juli 2020

